

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2006 - 2011

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Stratejik Instansi Pemerintah, yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan stratejik setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Rencana stratejik merupakan alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 – 2011 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006 – 2011 merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Pacitan selama tahun 2006-2011.

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Pada hakekatnya visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Pembangunan Kabupaten Pacitan yang telah dirumuskan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 – 2011 adalah :

***“Masyarakat Pacitan yang Maju, Adil, dan Sejahtera
Yang Berbasis pada Nilai–Nilai Agama dan Berbudaya”***

Makna dari visi tersebut adalah :

- Maju** : Kinerja Pembangunan daerah ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor–sektor prioritas yang secara langsung berdampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Pacitan secara berkelanjutan;
- ADIL** : Proses pembangunan daerah melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat, dan hasilnya dapat didistribusikan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Pacitan secara adil, transparan dan akuntabel;
- SEJAHTERA** : Kinerja pembangunan daerah didedikasikan untuk sebesar–besarnya menjamin terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat Pacitan secara berkelanjutan;
- NILAI – NILAI AGAMA** : Kehidupan masyarakat Pacitan senantiasa diwarnai oleh penghayatan nilai–nilai agama dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek nilai–nilai agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai–nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat diterapkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sehari –hari;

BERBUDAYA : Kinerja pembangunan daerah merupakan wahana untuk membangun pesona karakter warga masyarakat Pacitan yang berakhlak mulia, arif, matang, cerdas dan memiliki etos kerja produktif yang berdaya guna bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Pemerintah Kabupaten Pacitan dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Untuk mewujudkan visi ***“Masyarakat Pacitan yang Maju, Adil, dan Sejahtera Yang Berbasis pada Nilai–Nilai Agama dan Berbudaya”***, maka ditetapkan misi Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

1. **Melaksanakan percepatan pembangunan disegala bidang sesuai kaidah–kaidah pembangunan daerah;**
2. **Menjalankan administrasi publik berdasarkan prinsip–prinsip *good governance* dan *clean government*;**
3. **Mendorong dan memelihara komitmen semua pihak dalam kerangka membangun “ Sejuta Pesona Pacitan “;**
4. **Menciptakan iklim yang kondusif dan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan daya tarik investasi;**

Makna dari misi tersebut adalah :

1. Misi Kesatu

Melaksanakan percepatan pembangunan disegala bidang sesuai kaidah–kaidah pembangunan daerah. Keberhasilan kebijakan pembangunan daerah, tidak dapat dinilai secara sektoral, tetapi merupakan suatu kinerja yang menyeluruh (*total performance*). Hal ini juga berarti bahwa kinerja pembangunan tidak semata-mata diukur oleh keberhasilan pertumbuhan ekonominya, tetapi juga ditentukan oleh sejauhmana hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka perlu dirumuskan dan atau ditetapkan kebijakan publik yang adil dan kondusif, yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

2. Misi Kedua

Menjalankan administrasi publik berdasarkan prinsip – prinsip *good governance* dan *clean government*. Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pacitan akan dilandasi oleh penerapan budaya administrasi publik yang berdasarkan prinsip pemerintahan yang bersih dan berwibawa, meliputi : Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan dan Aturan Hukum (*Rule of Law*). Fokus pengembangan budaya administrasi publik pemerintahan daerah dengan karakter utama : (1) Berorientasi kepada masyarakat yang dilayani; (2) Mencerminkan layanan yang mencakup secara merata seluruh masyarakat tanpa ada pengecualian; (3) Administrasi pelayanan publik yang mudah dijangkau masyarakat; (4) Bersifat bersahabat; (5) Berasaskan pemerataan yang berkeadilan dalam setiap tindakan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat; (6) Mencerminkan wajah pemerintah yang sebenarnya (tidak bermuka dua) atau tidak menerapkan standar ganda dalam menentukan kebijaksanaan dan memberikan layanan terhadap masyarakat; (7) Berfokus pada kepentingan masyarakat dan bukannya kepentingan internal organisasi pemerintah; (8) Profesional; dan (9) Bersikap tidak memihak.

3. Misi Ketiga

Mendorong dan memelihara komitmen semua pihak dalam kerangka membangun “Sejuta Pesona Pacitan“. Partisipasi merupakan perwujudan perubahan paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan, masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat atau obyek belaka, melainkan

merupakan pelaku pembangunan yang mempunyai porsi penting. Dengan prinsip “dari dan untuk rakyat” mereka harus memiliki akses pada institusi yang mempromosikan pembangunan. Terdapat tiga komponen untuk meraih cita-cita “Sejuta Pesona Pacitan” yang bersifat mutualistik dan saling mendukung yaitu pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta. Pemerintah menciptakan lingkungan politik, ekonomi dan hukum yang kondusif. Sektor swasta menciptakan kesempatan kerja yang implikasinya meningkatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Masyarakat sipil memfasilitasi interaksi sosial politik untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

4. Misi Keempat

Menciptakan iklim yang kondusif dan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan daya tarik investasi. Lima faktor yang mempengaruhi iklim daya tarik investasi suatu daerah yaitu kelembagaan (kepastian hukum, aparatur, keuangan daerah dan peraturan daerah); sosial politik (stabilitas, keamanan dan budaya), ekonomi daerah (potensi dan struktur ekonomi), tenaga kerja dan produktivitas (biaya tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja dan produktivitas), infrastruktur fisik (ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik). Misi ini lebih menekankan pada terciptanya budaya supremasi hukum, khususnya dalam aspek kepastian hukum (*Legal Certainty*).

C. TUJUAN DAN SASARAN

C.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pacitan serta didasarkan pada isu-isu stratejik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2011, ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Pacitan. Tujuan Pemerintah Kabupaten Pacitan ada 13, yaitu :

1. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah;
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan masyarakat;
3. Meningkatnya fungsi fasilitasi dalam rangka pengembangan industri dan perdagangan;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perekonomian;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan SDA;

6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Pedesaan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
7. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan;
8. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat;
9. Meningkatnya perkembangan kapasitas aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan karakter "budaya administrasi publik berbasis Informasi Teknologi" di Pemerintah Pacitan;
10. Meningkatkan partisipasi (aksesibilitas) masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
11. Meningkatnya pengelolaan potensi kekayaan nilai – nilai budaya dan kepariwisataan;
12. Meningkatnya iklim yang kondusif untuk mendorong daya tarik investasi;
13. Meningkatnya budaya supremasi hukum melalui peningkatan konsistensi peraturan (*legal consistency*) dan penegakan hukum (*Law enforcement*);

C.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Pacitan ada 41

sasaran yaitu :

1. Meningkatnya sumber pembiayaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian;
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil peternakan sebagai pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;
4. Meningkatnya potensi ekonomi sumberdaya perikanan dan laut;
5. Terwujudnya potensi ekonomi sumberdaya hutan;
6. Meningkatnya produktivitas industri kecil dan UKM;
7. Meningkatnya fasilitasi kemitraan perdagangan;
8. Meningkatnya lembaga UMKM yang sehat dan berdaya saing;
9. Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas;
10. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi;
11. Meningkatnya pelayanan dan fungsi pendukung transportasi;
12. Meningkatnya pelayanan LITDES;
13. Terwujudnya lingkungan yang bersih, hijau dan lestari;
14. Terjaganya kualitas dan kuantitas sumber daya air;
15. Meningkatnya penanganan penduduk miskin dan pelayanan bagi penyandang kesejahteraan sosial;
16. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
17. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa;
18. Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini;

19. Meningkatnya pemenuhan wajib belajar 9 tahun;
20. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan menengah;
21. Meningkatnya manajemen dan mutu pendidikan;
22. Berkurangnya buta aksara dan meningkatnya wajib belajar melalui pendidikan non formal;
23. Meningkatnya wawasan dan ketrampilan pemuda dan prestasi olah raga;
24. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
25. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan;
26. Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit;
27. Menurunnya pasangan usia subur yang tidak terlayani pemenuhan KB-nya dan menurunnya angka kelahiran;
28. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah;
29. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan;
30. Tersusunnya dan meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan;
31. Meningkatnya tata kearsipan daerah;
32. Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan daerah;
33. Mewujudkan aparatur daerah yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN;
34. Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang pemerintahan umum;
35. Terciptanya penyebaran informasi secara cepat dan tepat;
36. Tertatanya data administrasi kependudukan;
37. Meningkatnya akuntabilitas kinerja legislatif;

- 38. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal;
- 39. Meningkatnya pengusahaan obyek wisata yang berbasis pada potensi sumberdaya alam daerah;
- 40. Meningkatnya investasi daerah;
- 41. Meningkatnya situasi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

D. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

D.1. Kebijakan

Kebijakan merupakan cara untuk mencapai sasaran, arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan pimpinan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Kebijakan mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2011 ada 16 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan daerah;
2. Penguatan dan perluasan jaringan pasar lokal serta optimalisasi sektor prioritas;
3. Penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal dan sektor prioritas;
4. Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian;
5. Konservasi ekologi kawasan;
6. Penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
7. Peningkatan layanan pendidikan;
8. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
9. Pengendalian pertumbuhan penduduk;
10. Peningkatan profesionalisme kinerja aparatur daerah;
11. Pemberantasan KKN;
12. Peningkatan pelayanan publik;
13. Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah;
14. Reaktualisasi warisan budaya lokal dan pariwisata;
15. Penyelenggaraan sistem manajemen pelayanan investasi terpadu;
16. Penegakan supremasi hukum.

D.2. Program

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, yang penjabarannya secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah atau bersifat tahunan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Berangkat dari agenda pembangunan daerah Kabupaten Pacitan serta rumusan program pembangunan daerah telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2006-2011 adalah sebanyak 170 program dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Agenda Pertama** : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktr untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Agenda ini akan memfokuskan pada pelaksanaan 51 program, yaitu :
 1. Pembangunan jalan dan jembatan
 2. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 3. Pembangunan turap/talud/bronjong
 4. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 5. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/ bronjong
 6. Tanggap darurat jalan dan jembatan
 7. Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

8. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
9. Pembangunan infrastruktur pedesaan
10. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
11. Pengembangan, pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
12. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah
13. Pengendalian banjir dan pengendalian tingkat pencemaran air sungai di daerah
14. Pengembangan perumahan
15. Evaluasi dan pengendalian infrastruktur peribadatan daerah
16. Peningkatan/pengembangan infrastruktur periadatan daerah
17. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
18. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
19. Peningkatan pelayanan angkutan
20. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
21. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
22. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
23. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
24. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
25. Pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana prasarana Rumah Sakit

26. Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit
27. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
28. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
29. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
30. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
31. Perencanaan dan pengembangan hutan
32. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
33. Peningkatan kemampuan teknologi industri
34. Peningkatan penerapan teknologi peternakan
35. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
36. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
37. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
38. Peningkatan pengendalian polusi
39. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
40. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
41. Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
42. Perencanaan tata ruang
43. Pemanfaatan ruang
44. Pengendalian pemanfaatan ruang
45. Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

46. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
47. Peningkatan kesejahteraan petani
48. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
49. Peningkatan ketahanan pangan
50. Peningkatan produksi hasil peternakan
51. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

b. **Agenda Kedua** : Pengentasan kemiskinan, pengangguran serta peningkatan kesempatan kerja. Agenda ini memfokuskan pada pelaksanaan 23 program, yaitu :

1. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
2. Pendidikan non formal
3. Pengembangan sentra-sentra industri potensial
4. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
5. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
6. Peningkatan kesempatan kerja
7. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
8. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
9. Pembinaan generasi muda dalam bidang ketenagakerjaan
10. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
11. Pembinaan anak terlantar

12. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
13. Pembinaan panti asuhan/panti jompo
14. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial
15. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat pedesaan
16. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
17. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
18. Penyediaan dan pengelolaan air baku
19. Lingkungan sehat perumahan
20. Pengembangan lingkungan sehat
21. Upaya kesehatan masyarakat
22. Pelayanan kesehatan penduduk miskin
23. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

- c. **Agenda Ketiga** : Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Agenda ini akan memfokuskan pada pelaksanaan 73 program, yaitu :

1. Pendidikan anak usia dini
2. Pendidikan menengah
3. Pendidikan luar biasa
4. Peningkatan mutu pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Manajemen pelayanan pendidikan
6. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
7. Peningkatan peran serta kepemudaan

8. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
9. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
10. Kesehatan reproduksi remaja
11. Promosi kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
12. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
13. Pengawasan obat dan makanan
14. Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
15. Peningkatan pelayanan lansia
16. Perbaikan gizi masyarakat
17. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
18. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
19. Standarisasi pelayanan kesehatan
20. Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
21. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
22. Obat dan perbekalan kesehatan
23. Keluarga berencana
24. Pelayanan kontrasepsi
25. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri
26. Pengembangan wilayah transmigrasi
27. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
28. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

29. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
30. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
31. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
32. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
33. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
34. Pendidikan kedinasan
35. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
36. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
37. Evaluasi peningkatan kinerja pemerintah secara terukur
38. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
39. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
40. Perencanaan pembangunan daerah
41. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
42. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
43. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
44. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
45. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

46. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
47. Pengembangan Kemitraan
48. Kerjasama pembangunan
49. Penataan administrasi kependudukan
50. Perbaikan sistem administrasi kearsipan
51. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
52. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
53. Pengembangan data/informasi/statistik daerah
54. Peningkatan kualitas pelayanan informasi
55. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
56. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
57. Kerjasama informasi dengan mass media
58. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
59. Pengembangan model operasional BKB-Posyandu
60. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
61. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
62. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
63. Pengendalian kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
64. Pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam
65. Pengembangan wawasan kebangsaan
66. Pendidikan politik masyarakat
67. Penataan peraturan perundang–undangan

68. Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
69. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
70. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
71. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
72. Perencanaan pembangunan ekonomi
73. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

d. **Agenda Keempat** : Pengembangan potensi pariwisata berbasis warisan budaya lokal dan nilai-nilai religius. Agenda ini akan memfokuskan pada pelaksanaan 5 program, yaitu :

1. Pengembangan nilai budaya
2. Pengembangan pemasaran pariwisata
3. Pengembangan destinasi pariwisata
4. Perencanaan sosial budaya
5. Pengelolaan kekayaan budaya

e. **Agenda Kelima** : Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Agenda ini akan memfokuskan pada pelaksanaan 18 program, yaitu :

1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
2. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
3. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
4. Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif

5. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
6. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
7. Peningkatan dan pengembangan ekspor
8. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
9. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
10. Pengembangan industri kecil dan menengah
11. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
12. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
13. Pengembangan budidaya perikanan
14. Pengembangan perikanan tangkap
15. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
16. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
17. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
18. Pelestarian/perlindungan/pemeliharaan sumber daya alam yang ada

E. RENCANA KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam penyusunan rencana kinerja ditetapkan mengenai tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan

program/kegiatan, juga memberikan target (*quantitative objectives*) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya; program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2011 disusun Rencana Kinerja Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang di dalamnya dijabarkan mengenai rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun 2010 sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan Tahun 2010.

Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Pacitan melaksanakan 159 (seratus lima puluh sembilan) program, 41 (empat puluh satu) sasaran dengan 187 (seratus delapan puluh tujuh) indikator kinerja utama. Kesemuanya terinci dan akan dicapai melalui 618 kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2010 sebesar Rp.691.292.318.971,46.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2011 target indikator kinerja sasaran yang akan dicapai pada tahun 2010 diuraikan per-sasaran sebagai berikut :

Tabel II.1.

Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

No	Sasaran	Indikator		Target
		No	Uraian	
1	Meningkatnya sumber pembiayaan pembangunan daerah	1.1	% PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD	4,80
		1.2	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan	Maret
		1.3	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP
		1.4	Ketepatan waktu penetapan APBD	Desember

Tabel II.2.

Target Indikator Kinerja Sasaran 2 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

No	Sasaran	Indikator		Target
		No	Uraian	
2.	Meningkatnya produksi dan produktivas hasil pertanian	2.1	% peningkatan jumlah petani trampil	28,94
		2.2	% peningkatan produksi hasil pertanian :	
			• Padi	105
			• Jagung	107
			• Sayuran	81,46
			• Buah-buahan	125
		2.3	% kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	41,00
		2.4	% peningkatan ketersediaan bahan pangan	
			- Beras	1,72
			- Jagung	31,60
			- Gula Merah	2,14
			- Telur	0,11
			- Daging	0,73
		2.5	Angka kecukupan gizi masyarakat sesuai standar minimal di tingkat konsumsi (KKal/Kapita/Hari)	97,85

Tabel II.3.

Target Indikator Kinerja Sasaran 3 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil peternakan sebagai pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat	3.1	% peningkatan produksi daging	1,75
		3.2	% peningkatan produksi telur	1,25
		3.3	% peningkatan populasi ternak besar	1,75
		3.4	% peningkatan populasi ternak kecil	2,25
		3.5	% peningkatan populasi ternak unggas	1,00
		3.6	% peningkatan kelahiran hasil IB	1,75

Tabel II.4.

Target Indikator Kinerja Sasaran 4 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
4.	Meningkatnya potensi ekonomi sumberdaya perikanan dan laut	4.1	% Peningkatan produksi perikanan budidaya kolam	395.206 kg
		4.2	% Peningkatan produksi perairan umum (sungai, telaga, waduk)	354.845 kg
		4.3	% Peningkatan produksi perikanan laut	1.947.594 kg
		4.4	Peningkatan jumlah unit usaha pengolahan	11 unit
		4.5	Peningkatan jumlah kelompok usaha nelayan/wanita nelayan	50 klpk

Tabel II.5.

Target Indikator Kinerja Sasaran 5 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
5.	Terwujudnya potensi ekonomi sumberdaya hutan	5.1	% penurunan kebakaran hutan	65,61
		5.2	% peningkatan luas hutan rakyat	1,01
		5.3	% penurunan lahan kritis	91,17

Tabel II.6.

Target Indikator Kinerja Sasaran 6 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
6.	Meningkatnya produktivitas industri kecil dan UKM	6.1	% peningkatan jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan	101,39
		6.2	% kemudahan ijin usaha IKM	100,00
		6.3	% kontribusi sektor industri terhadap PDRB	4,18

Tabel II.7.

Target Indikator Kinerja Sasaran 7 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
7.	Meningkatnya fasilitas kemitraan perdagangan	7.1	% peningkatan penyediaan sarana & prasarana pasar	117,07
		7.2	% tera ulang yang dilaksanakan	108,42
		7.3	% kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10,33

Tabel II.8.

Target Indikator Kinerja Sasaran 8 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
8.	Meningkatnya lembaga UMKM yang sehat dan berdaya saing	8.1	% peningkatan UMKM mendapat bantuan modal	453,53
		8.2	Peningkatan kesehatan kelembagaan koperasi	295,35
		8.3	Peningkatan anggota koperasi	108,24
		8.4	Peningkatan jumlah lembaga koperasi	104,00

Tabel II.9.

Target Indikator Kinerja Sasaran 9 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
9	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas	9.1	Penurunan pengangguran	46,13
			• AKL	1,99
			• AKAN	14,23
			• AKAD	
		9.2	% meningkatnya peserta jamsostek	15,01
		9.3	% peningkatan UMK	148,15

Tabel II.10.

Target Indikator Kinerja Sasaran 10 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
10	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi	10.1	% peningkatan panjang drainase yg layak	62,96
		10.2	% peningkatan turap/talud/bronjong	64,43
		10.3	% panjang jalan yang dibangun	58,27
		10.4	% jembatan yang dibangun	73,50

Tabel II.11.

Target Indikator Kinerja Sasaran 11 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
11	Meningkatnya pelayanan dan fungsi pendukung transportasi	11.1	% pemeliharaan sarana pengujian kendaraan	16,67
		11.2	% Pemeliharaan fasilitas LLAJ/perengkapan jalan	16,00
			• APILL	11,05
			• Rambu	
		11.3	% jumlah armada angkutan yang memenuhi persyaratan	0,89
		11.4	% peningkatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	
			- Jalan Desa	41,26
			- Jembatan	90,92
		11.5	% peningkatan cakupan layanan air bersih	31,60
		11.6	% peningkatan jumlah desa/kelurahan terlayani air bersih	64,33
		11.7	% rumah tangga ber-sanitasi	76,42
		11.8	Rasio rumah layak huni	87,16

Tabel II.12.

Target Indikator Kinerja Sasaran 12 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
12.	Meningkatnya pelayanan LITDES	12.1	% rumah tangga yang menggunakan listrik	49,03

Tabel II.13.

Target Indikator Kinerja Sasaran 13 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
13	Terwujudnya lingkungan yang bersih, hijau dan lestari	13.1	% Skor evaluasi Bangun Praja	115,38
		13.2	% penanganan sampah	20,19
		13.3	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) kabupaten per satuan penduduk	0,46
		13.4	% bertambahnya ruas jalur hijau yang tertata	17,70
		13.5	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	34,90
		13.6	% penurunan jumlah penambangan liar	24,64
		13.7	% pemakai air tanah yg berijin	70,00

Tabel II.14.

Target Indikator Kinerja Sasaran 14 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
14	Terjaganya kualitas dan kuantitas sumber daya air	14.1	% peningkatan kondisi jaringan irigasi	64,15
		14.2	% peningkatan ketersediaan sumber daya air	97,19
		14.3	% menurunnya luas genangan banjir	89,97

Tabel II.15.

Target Indikator Kinerja Sasaran 15 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
15	Meningkatnya penanganan penduduk miskin dan pelayanan bagi penyandang kesejahteraan sosial	15.1	% penurunan jumlah penduduk miskin	17,18
		15.2	% pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	17,05
		15.3	% lembaga kesejahteraan sosial yang dibantu dan difasilitasi	20,00
		15.4	Pengiriman transmigran	15 KK

Tabel II.16.

Target Indikator Kinerja Sasaran 16 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
16	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	16.1	% jumlah kasus KDRT yang ditangani	40
		16.2	% KDRT/jumlah rumah tangga	0,0029

Tabel II.17.

Target Indikator Kinerja Sasaran 17 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	17.1	% Teknologi Tepat Guna (TTG) diterapkan	16,37
		17.2	Rata-rata jumlah kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK/LKMD)	66,67
		17.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	40,00
		17.4	% tingkat keswadayaan masyarakat	35,39
		17.5	% peningkatan kapasitas BUM Desa (LKD) yang disehatkan	12,05
		17.6	% desa dengan administrasi baik	78,92
		17.7	% jumlah aparatur dilatih tata pemerintahan desa	28,62

Tabel II.18.

Target Indikator Kinerja Sasaran 18 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
18	Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini	18.1	APK PAUD	42,96
		18.2	APK TK	43,00

Tabel II.19.

Target Indikator Kinerja Sasaran 19 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
19	Meningkatnya pemenuhan wajib belajar 9 tahun	19.1	APK SD/MI	104,00
			APK SMP/MTs	97,00
		19.2	APM SD/MI	97,00
			APM SMP/MTs	77,50
		19.3	Angka Melanjutkan	99,50
		19.4	Angka Putus Sekolah SD/MI	0
			SMP/MTs	0,25
		19.5	Angka Lulusan SD/MI	99,75
			SMP/MTs	98,79
		19.6	Rasio Siswa – Guru SD/MI	11,00
			SMP/MTs	11,00
		19.7	% sekolah yang menerapkan MBS	100,00

Tabel II.20.

Target Indikator Kinerja Sasaran 20 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
20	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan menengah	20.1	APK SMA/MA/SMK/Paket C	55,00
		20.2	APM SMA/MA/SMK/Paket C	42,00
		20.3	Angka Putus Sekolah	0,97
		20.4	Angka Lulusan	97,92
		20.5	Rasio Guru -Siswa	10,62
		20.6	% sekolah yang menerapkan MBS	100,00
		20.7	% Jumlah Sarana Prasarana SLB tersedia	55,00

Tabel II.21.

Target Indikator Kinerja Sasaran 21 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
21	Meningkatnya manajemen dan mutu pendidikan	21.1	Prosentase guru sesuai kualifikasi : SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK	25,50 80,00 91,00
		21.2	% Berfungsi sistem informasi manajemen pendidikan	100,00

Tabel II.22.

Target Indikator Kinerja Sasaran 22 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
22	Pemberantasan buta aksara dan meningkatkan wajib belajar melalui pendidikan formal	22.1	Persentase garapan kejar paket A	100,00
		22.2	Persentase garapan kejar paket B	90,00
		22.3	Persentase garapan kejar paket C	90,00
		22.4	Meningkatnya kunjungan ke perpustakaan	3,44
		22.5	Meningkatnya jangkauan layanan perpustakaan Keliling	38,46

Tabel II.23.

Target Indikator Kinerja Sasaran 23 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
23	Meningkatnya wawasan dan ketrampilan pemuda dan prestasi olah raga	23.1	% jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	84,76
		23.2	% jenis olah raga yang berprestasi	81,82
		23.3	% klub olahraga yang dibina	73,68
		23.4	% peningkatan turnamen/kompetisi olah raga	128,57

Tabel II.24.

Target Indikator Kinerja Sasaran 24 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
24	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	24.1	Cakupan rawat jalan	15,00
		24.2	Cakupan rawat inap	1,50
		24.3	Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat	92,00
		24.4	Posyandu purnama	40,00%
		24.5	% Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	6,84
		24.6	Cakupan Minimal Jenis Tindakan Medis yang disediakan RS	87,57
		24.7	Cakupan Minimal Jenis Tindakan Penunjang Medis yang disediakan RS	75,00
		24.8	% penderita malaria yang diobati	100,00
		24.9	% Klien mendapatkan penanganan HIV/ AIDS	100,00
		24.10	% Infeksi menular seksual yang diobati	100,00
		24.11	% Penderita kusta selesai berobat (RFT rate)	>90%
		24.12	% Penderita DBD yang ditangani	100,00
		24.13	Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	90,00%
		24.14	Kesembuhan penderita TBC BTA positif	> 85%
		24.15	Rumah tangga sehat	60,00%

Tabel II.25.

Target Indikator Kinerja Sasaran 25 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
25	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	25.1	% penduduk miskin yang terjangkau dalam Jaring Pengaman Kesehatan Masyarakat (JPKM)	88,00
		25.2	% Jumlah puskesmas berfungsi baik	100,00
		25.3	% Jumlah puskesmas pembantu yang berfungsi dengan baik	100,00
		25.4	% Jumlah pusling berfungsi dengan baik	100,00
		25.5	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	70,00%
		25.6	% jumlah balita dengan gizi buruk	1,5%
		25.7	% jumlah kecamatan/kelurahan bebas rawan gizi	80,00
		25.8	Cakupan kunjungan neonatus	100,00%
		25.9	Cakupan kunjungan bumil K-4	95,00%
		25.10	Cakupan kunjungan bayi	90,00%
		25.11	% jumlah ibu hamil resiko tinggi/komplikasi yang ditangani	80,00%
		25.12	% neonatal resiko tinggi/komplikasi ditangani	80,00%
		25.13	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90,00%
		25.14	Bayi yang mendapat ASI eksklusif	75,00%
		25.15	Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah	90,00%
		25.16	Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru	100,00%

Tabel II.26.

Target Indikator Kinerja Sasaran 26 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
26	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	26.1	Cakupan minimal penyediaan kelengkapan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis	81,16%
		26.2	Cakupan minimal ketersediaan ruangan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap & penunjang medis	93,52%
		26.3	Cakupan minimal ketersediaan Sistem Informasi Manajemen	100,00%
		26.4	% jumlah ambulance/mobil jenazah tersedia	83,33%
		26.5	Cakupan minimal ketersediaan SDM RS	75,43%
		26.6	Cakupan minimal pelayanan terapi di rumah sakit	98,00%
		26.7	% Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan RSUD	95,98

Tabel II.27.

Target Indikator Kinerja Sasaran 27 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
27	Menurunnya pasangan usia subur yang tidak terlayani pemenuhan KB-nya dan menurunnya angka kelahiran	27.1	% PUS yang menjadi peserta KB Aktif	83,41
		27.2	Meningkatnya peserta KB Pria	19,21
		27.3	% pemasangan kontrasepsi KB	95,65
		27.4	% alat kontrasepsi tersedia	1,69
		27.5	% kelompok masyarakat peduli KB	18,58

Tabel II.28.

Target Indikator Kinerja Sasaran 28 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
28	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan	28.1	% jumlah penyelenggaraan pendidikan & latihan <ul style="list-style-type: none"> • Struktural • Fungsional • Tehnis 	100,00%
				100,00%
				55,60%
		28.2	% pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi	48,26%
		28.3	% pejabat fungsional yang memenuhi standar kompetensi	94,99%
		28.4	% jumlah SKPD yang di -ABK	21,28%
		28.5	% pengajuan ranperda	100,00%
		28.6	% penerbitan SK Bupati	100,00%
		28.7	% penyelesaian Kasus Hukum	100,00%

Tabel II.29.

Target Indikator Kinerja Sasaran 29 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
29	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan	29.1	% jumlah penelitian yang dimanfaatkan	80,00
		29.2	% tindak lanjut hasil penelitian	51,11
		29.3	% penetapan RTRW kawasan strategis & cepat tumbuh	13,64
		29.4	% partisipasi masyarakat yang dimanfaatkan dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	81,24
		29.5	Ketepatan waktu penetapan RKPD Daerah	100,00
		29.6	% peningkatan kerjasama antar daerah	133,33
		29.7	Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga	125,00

Tabel II.30.

Target Indikator Kinerja Sasaran 30 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
30	Tersusunnya dan meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan	30.1	% luas wilayah Pacitan yang sudah mempunyai rencana rinci	74,29
		30.2	% pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	4,38

Tabel II.31.

Target Indikator Kinerja Sasaran 31 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
31	Meningkatnya tata kearsipan	31.1	% jumlah arsip yg diselamatkan/diamankan	82,48
		31.2	% pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan	82,73

Tabel II.32.

Target Indikator Kinerja Sasaran 32 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
32.	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan daerah	32.1	% ketersediaan Sistem Informasi Keuangan daerah	33,33

Tabel II.33.

Target Indikator Kinerja Sasaran 33 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
33.	Mewujudkan aparaturnya daerah yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN	33.1	% ketaatan obrik terhadap temuan Bawas	92,86
		33.2	% pemenuhan pelaksanaan terhadap PKPT dan Non PKPT	100,00
		33.3	% updating dan analisis data capaian kinerja program dan kegiatan : • Program • Kegiatan	100 100
		33.4	% Pengukuran IKM SKPD	83,33
		33.5	% jumlah rekomendasi evaluasi kegiatan yang ditindaklanjuti	100,00
		33.6	% tindak lanjut pengaduan masyarakat	100,00

Tabel II.34.

Target Indikator Kinerja Sasaran 34 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
34.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan Umum	34.1	Optimalisasi pemanfaatan TI	31,40
		34.2	Penyambungan Website Kab. Pacitan	48,48
		34.3	% luas lahan bersertifikat	11,87
		34.4	% Tanah aset Pemda bersertifikat	96,54

Tabel II.35.

Target Indikator Kinerja Sasaran 35 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
35	Terciptanya penyebaran informasi secara cepat dan tepat	35.1	% peningkatan frekuensi penerangan umum	167,67%
		35.2	Rata-rata publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten	58 kali

Tabel II.36.

Target Indikator Kinerja Sasaran 36 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
36.	Tertatanya data administrasi kependudukan	36.1	% penduduk ber-KTP dan ber-Akte	
			- KTP	58,17%
			- Akte	87,15%

Tabel II.37.

Target Indikator Kinerja Sasaran 37 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
37.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja legislatif	37.1	% penerbitan perda	100,00
		37.2	% aspirasi yang ditindaklanjuti	82,51

Tabel II.38.

Target Indikator Kinerja Sasaran 38 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
38.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	38.1	% padepokan seni & budaya dibantu	50,72%
		38.2	% peningkatan even seni dan budaya	214,29%

Tabel II.39.

Target Indikator Kinerja Sasaran 39 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
39.	Meningkatnya pengusahaan obyek wisata yang berbasis pada potensi sumberdaya alam daerah	39.1	% obyek wisata yang layak jual	29,27%
		39.2	% peningkatan kunjungan wisatawan	110,82%

Tabel II.40.

Target Indikator Kinerja Sasaran 40 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
40	Meningkatnya investasi daerah	40.1	% peningkatan jumlah investasi	1,11%
			• investasi PMA	1,13%
			• investasi PMDN	1,13%
			• investasi Non PMDN/PMA	1,17%
			• investasi Pemda	0,83%
		40.2	Rata-rata waktu perijinan terbit	
			- IMB (hari)	10 hari
			- Ijin lain (hari)	6 hari
		40.3	% rumah memiliki IMB	28,71%

Tabel II.41.

Target Indikator Kinerja Sasaran 41 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Sasaran		Indikator		Target
No	Uraian	No	Uraian	
41	Meningkatnya situasi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	41.1	% ketaatan masyarakat terhadap Perda	70,97
		41.2	Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk	132,00
		41.3	% peningkatan personil yang dididik dan dilatih kelinmasan	80,74
		41.4	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	72,16
		41.5	Rasio Pos Siskamling per Desa/Kelurahan	100,00